

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, (Jakarta, 2015).
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2018).
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, eresco,(Bandung,1992).
- Sri Pudyatmoko,*Pengantar Hukum Pajak*,ANDI, (Yogyakarta, 2002).
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung 2005).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta 2007).
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, (Yogyakarta 2009).
- Chaerudin DKK, Op.Cit
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, (Yogyakarta 2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta (Bandung 2012).
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Sinar Ghalia, (Bandung 2003).
- Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, (Yayasan Obor Indonesia, 2000).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung 2007).
- Handayani, D & Tahir, P. (2018). *Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.
- Yulkarnanin Harahab, Abdul Ghofur Anshori.*Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, (Jakarta 2008).
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, (Jakarta 2010).

Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, (Jakarta, 2008).

Abdur rafi' & Abu Fida. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, (Jakarta, 2006).

Rahmanuddin, Tomalili. *Hukum Pidana*. (Deepublish, 2019).

Peraturan & Putusan

Indonesia, *Undang-Undang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1998*, Pasal 1 (1), telah di sempurnakan terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat(2), Pasal 22D, Dan Pasal 23A.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2010*, Nomor 69 Pasal 1 ayat (1).

_____Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2010*, Nomor 69 Pasal 1 ayat (5).

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999*, Pasal 2 (1).

Pengadilan Negeri Surabaya,” Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby.”

_____Pengadilan Negeri Surabaya,” Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby”.

_____Pengadilan Negeri Surabaya,” Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby”.

Putusan Mahkamah Agung “Nomor 59 / Pid.Sus-TPK/ 2019 / PN.Sby”.

_____Putusan Mahkamah Agung “Nomor 48/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY”.

_____Putusan Mahkamah Agung, “Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020”.

Pengadilan Negeri Surabaya,” Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby”.

_____Putusan Mahkamah Agung “Nomor 59 / Pid.Sus-TPK/ 2019 / PN.Sby”.

_____Putusan Mahkamah Agung, “Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020”.

Karya Tulis Skripsi, Jurnal & Makalah

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

Suhatrizal, *Diktat Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2012.

Lilik Mulyadi, *Asas-Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, (Bandung: Alumni, 2007).

Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Niken Olivia pattudju, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota Makassar*”, (Skripsi Universitas Bosowa, Makasar,2021).

Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Skripsi Universitas Brawijaya. Jakarta 2016).

_____Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, (Jakarta, 2016).

Rona, Rositawati. *Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: (Semarang, 2019).

Fakhri Muhammad, dan Tjahjono Ahmad. *Perpajakan*. : UPP AMP YKPN (Yogyakarta, 2005).

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing)
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227.
- Runtukahu, E. (2012). Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material. *Lex Crimen*, 1(2).
- Satria, B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil. *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1).
- Elvi Zahara, Lubis. "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 7, no. 2 (2017).
- Yohana Puspitasari & Wardoyo Sulardi Sulardi. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 8(3).
- Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- M Fauzan, M. F. (2014). *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Nst, J.K.R., 2018. *Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta:PSZ STIS, 2004).

- Solekhan, M. (2016). PAJAK DAN ZAKAT DILIHAT DARI HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(1).
- MUKSIN, A. (2019). *Hukum Zakat dan Pajak Perorangan (Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Malik)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- IRAWAN, B. (2022). *Analisis Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1).
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*. Deepublish.
- Imran Rahman, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam".
- A. Malthuf Siroj, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya".
- Yulkarnanin Harahab, Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008.
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010.
- Safaruddin, Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Dodo Mustakid, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon*, 2021.
- Edwar, A. (2021). Hukuman Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh. *Almarhalah/ Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1).
- Fuqih Rahmat Shaleh, Faizah, Silviana Nur. "Penanaman Nilai Anti Korupsi melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MI Bustanut

Thalabah." *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 02 (2020).

Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta 'Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2).

Ma'nunah, N. S. I. (2017). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Al-Jinayah–Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2).

Ending Jurnal, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Surya Kencana*, Cianjur, 2014.

Internet

Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> di akses pada tanggal 23 Februari 2022.

Grc-Indonesia.com, "Suap-Menyuap dalam Perspektif Islam, <https://grc-indonesia.com/suap-menyuap-dalam-perspektif-islam/>" diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 23 Maret 2022 Pukul 21:30 WITA.

Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9> akses pada tanggal 16 Mei 2022.

_____ Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/sura/6> akses pada tanggal 16 Mei 2022.

_____ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> akses pada tanggal 24 April 2022.

_____ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> akses pada tanggal 25 April 2022.

_____ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> akses pada tanggal 27 April 2022.

_____ Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> akses pada tanggal 27 April 2022.

____ Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/sura/8> akses pada tanggal 27 April 2022.